

**Analisis Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Pegawai Sipil Negara di Kantor Upt Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara**

**Ananda Putri Azni Matondang**

**Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia**

[anandaazni54@gmail.com](mailto:anandaazni54@gmail.com)

**Abstrak**

Inspektorat Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara harus fokus pada sistem akuntansi risiko untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri pekerja dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata serta menjamin pekerjaan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja sistem akuntansi JKK pada dinas pengawasan ketenagakerjaan wilayah Provinsi Sumatera Utara I. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan sifat penelitian dijelaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi kecelakaan kerja di kantor Ketenagakerjaan Daerah Kota Medan dikelola dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh karyawan dalam organisasi.

**Kata kunci:** Analisis, Sistem Akuntansi, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

**Abstract**

*In order to increase the dignity, worth and self-esteem of the workforce as well as to create a prosperous, fair and equitable society as well as to get decent work guarantees, the Upt Office for Labor Supervision Region I of North Sumatra Province needs to pay attention to the JKK Claims Accounting System in the form of registration for Civil Servants at the Office the. This study aims to determine how the JKK accounting system for civil servants in the Upt Office of Labor Supervision Region I, North Sumatra Province. This study uses qualitative methods and the type of research used is descriptive. The results of the study show that the Work Accident Insurance that applies at the Regional I Employment Supervision Upt Office of Medan City is managed well in serving every employee of the company properly.*

**Keywords:** Analysis, Accounting System, Work Accident Insurance (JKK)

## **PENDAHULUAN:**

Pegawai adalah orang yang bekerja dalam produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. (Soleh, 2017) menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang sedang bekerja, mencari pekerjaan atau melakukan sesuatu yang lain. Pada saat yang sama, kerja adalah kerja fisik dan intelektual para pekerja yang terlibat dalam produksi intensif, baik secara internal maupun eksternal. Dengan demikian, penduduk suatu negara dianggap terbagi menjadi kelas pekerja dan kelas non-pekerja. Misinya adalah untuk menambah nilai bagi karyawan dan membangun komunitas yang berkembang secara fisik, mental, efisien dan berkelanjutan.

Untuk itu, akuntabilitas dalam bentuk catatan publik sangat penting untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja serta menciptakan lapangan kerja yang efektif, adil dan aman. Dinas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sumatera Utara. Asuransi kecelakaan adalah perusahaan yang membayar upah dan tunjangan kepada penerima manfaat yang bertanggung jawab. Perangkat ini dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan pegawai pemerintah dan melindungi mereka jika terjadi kecelakaan. Asuransi kecelakaan yang disingkat JKK adalah perlindungan terhadap risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja berupa tunjangan kesehatan, santunan dan cacat; Keputusan Pemerintah no. 70 dari

Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi program Asuransi Kecelakaan (ACI). Salah satu strategi keuangan yang digunakan oleh perusahaan adalah strategi distribusi kas. Sistem manajemen arus kas merupakan bagian integral dari sistem manajemen arus kas yang sering digunakan untuk memantau aktivitas, dokumen, dan catatan yang terkait dengan pengelolaan arus kas. Sistem akuntansi kecelakaan lalu lintas sangat erat kaitannya dengan sistem ganti rugi, karena kerugian harus dicatat pada perusahaan asuransi sesuai dengan amanat.

Pekerja adalah orang yang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam menggerakkan dua roda pemerintahan dalam skala yang lebih kecil atau lebih besar. Pemerintah Pemerintah mempekerjakan sejumlah besar orang untuk membantu mereka menggerakkan roda mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu pegawai atau orang yang dipekerjakan oleh pemerintah berpangkat pegawai negeri. Pegawai Negeri Sipil (STS) adalah bagian dari Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang beroperasi sehari-hari dan

menduduki jabatan tertentu dalam dinas. Dengan dukungan pemerintah nasional, ia memainkan peran penting dalam membangun sistem untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di negara ini.

Pegawai negeri sipil harus dijamin atau nyaman dalam melaksanakan tugasnya dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam bentuk catatan publik penting untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja dan untuk menciptakan tempat kerja yang sukses, adil dan aman. Salah satu cara untuk menciptakan tempat kerja yang berkembang, adil dan aman adalah dengan memiliki asuransi profesional. Perangkat ini dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan pegawai negeri dan melindungi mereka jika terjadi kecelakaan. Asuransi kecelakaan adalah singkatan dari ICC yang melindungi terhadap tunjangan kesehatan, santunan dan kecelakaan akibat cacat kerja atau penyakit akibat kerja. Bab 70 UU Publik No. 2015 Bab 1

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Cicilia C. Tasicred et al., 2018, dimana konten dengan judul analisis sistem akuntansi klaim jaminan kecelakaan kerja (jkk) bagi aparatur sipil negara pada pt. dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (persero) kantor cabang manado. Audit sistem asuransi kompensasi pekerja berjalan efektif dan sesuai dengan praktik yang ada, yang ditunjukkan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara hal-hal yang terkait dengan wewenang mereka yang terlibat dalam pembayaran klaim.

Studi pendahuluan oleh Nita Ayu Krisnavati dkk pada tahun 2020 judul analisis sistem dan prosedur pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja dalam upaya meningkatkan pengendalian intern pada bpjs ketenagakerjaan cabang Kediri, menunjukkan hasil bahwa Penerapan sistem akuntansi pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja sudah baik. BPJS Kediri Cabang Kediri memiliki hasil penilaian penulis. Kebaruan dari penelitian ini adalah di Kediri cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kediri, untuk meningkatkan pengendalian internal, belum ada penelitian tentang analisis sistem dan operasi pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja.

Penyelidikan lain dilakukan oleh Hafid Arighi pada tahun 2020 Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Sosial Dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. Hasil tersebut disajikan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung 32 P/HUM/2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi 98/PUU-XV/2017, ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah tentang

asuransi kecelakaan kerja di 2015 dan hukuman mati. untuk angkutan sipil negara DZSN No. 40 Tahun 2004, UU No. Peraturan Nomor 109 tentang PPSS dan Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Presiden Tahun 2013.

Artikel ini memiliki tujuan ini untuk memastikan bahwa mengetahui Bagaimana sistem akuntansi JKK bagi PNS di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana system Akuntansi Klaim JKK bagi PNS di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi perlindungan atas resiko kecelakaan ?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi Klaim JKK bagi PNS di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi perlindungan atas resiko kecelakaan kepada PNS di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana system Akuntansi Klaim JKK bagi PNS di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi perlindungan atas resiko kecelakaan!
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi Klaim JKK bagi PNS di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi perlindungan atas resiko kecelakaan kepada PNS di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara!

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sistem adalah sekelompok elemen yang terkait erat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, sistem dirancang untuk memantau peristiwa yang berulang atau sering terjadi. Faktur, faktur adalah proses yang berkelanjutan, karenanya pernyataan, catatan akuntansi, dan spreadsheet juga dihasilkan dari

transaksi ini atau laporan keuangan disiapkan untuk digunakan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, sistem akuntansi merupakan kumpulan dari item-item yaitu formulir, laporan keuangan, buku besar, buku besar dan laporan keuangan yang digunakan oleh para eksekutif untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi adalah untuk menyediakan informasi umum kepada pengguna tentang pelaporan keuangan organisasi, kondisi keuangan dan arus kas, serta informasi lain yang diperoleh selama kegiatan bisnis dan pembukuan normal. Waktu.

Menurut Mondy (2010), keselamatan kerja adalah perlindungan pekerja dari kecelakaan kerja. Bahaya keselamatan adalah aspek yang dapat mengakibatkan kebakaran di tempat kerja, sengatan listrik, terpotong, memar, tumpahan, tanah longsor, kehilangan anggota badan, penglihatan dan pendengaran. Kecelakaan dapat terjadi di perusahaan, bahkan di perusahaan yang sangat sensitif terhadap keamanan. Sebuah organisasi harus menganalisis secara menyeluruh setiap insiden untuk menentukan apakah terjadi kecelakaan atau tidak dan apakah itu disebabkan oleh kecelakaan. Mencegah kecelakaan di tempat kerja memerlukan pengorganisasian program keselamatan. Rencananya bisa sangat sederhana. Terlepas dari ukuran organisasi. Agar program keberlanjutan berjalan ke arah yang benar, diperlukan dukungan manajemen di tingkat tertinggi. Para eksekutif perusahaan harus menyadari penderitaan dan kerugian ekonomi yang luar biasa yang disebabkan oleh bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1992, "Asuransi Sosial Tenaga Kerja:" Penggantian perlindungan bagi tenaga kerja berupa ganti rugi moneter dan hilangnya upah dan tunjangan karena kecelakaan atau pengurangan; melalui kecelakaan, penyakit, kelahiran berupa kehamilan, persalinan, hari tua dan kematian. " Sesuai dengan ketentuan Bagian 6, Bagian 1, Bagian 1 Undang-Undang Asuransi Sosial 1992, ruang lingkup Skema Asuransi Sosial Karyawan meliputi: Asuransi Kecelakaan Kerja; asuransi jiwa; Jaminan hari tua dan kesehatan Sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 6 dari Kode Tenaga Kerja, asuransi sosial disediakan untuk karyawan. Jaminan sosial karyawan kecuali jaminan kesehatan (JAMSOSTEK).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Wilayah I yang beralamat di Jl. Williem Iskandar No 331, Sidoarjo Hilir, Kec. Medan

Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama sebulan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan deskriptif untuk memberikan informasi tentang hubungan yang kompleks antara sumber partisipan dan penjelasan partisipan. Metode pengumpulan data digunakan sebagai alat bantu. Dokumen adalah komponen kunci dari kualitas, persyaratan, dan analisis operasional. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, wawancara, korespondensi, dan penelitian kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan magang yang peneliti lakukan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Wilayah I yang beraJamat di Jl. Williem Iskandar No 331, Sidoarjo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Selama proses magang, penulis ditempatkan di Bagian Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) selama kurun waktu 1 bulan. Selama kerja praktek (praktis) di kantor pengelolaan UPT wilayah I, kegiatan penulis juga dimaksudkan untuk mengetahui fungsi dan tugas terpenting dalam peran pengamanan Fasilitas di bawah pengelolaan dan pengendalian UPT. Dan juga Melakukan Kerja bakti di lingkungan kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

Dari segi tugas dan tanggung jawab, uraian tugas dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Sumut UPT wilayah I.

1. Tugas UPT di bidang kesehatan dan keselamatan kerja adalah mendukung pemenuhan kewajiban teknis dalam pekerjaan pemberi jasa dan mendukung kebijakan dalam mendukung langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja. keadilan dan peraturan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.
2. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UPT) beroperasi sebagai berikut:
  - a) Pelatihan personel kantor teknis gedung untuk keselamatan dan kesehatan kerja
  - b) Memberi nasihat kepada inspektur teknis, manajer konstruksi, dan inspektur tenaga kerja.
  - c) Kesehatan dan keselamatan kerja, presentasi, investigasi, investigasi dan kecelakaan kerja.

- d) Peraturan ketenagakerjaan Peraturan keselamatan kerja Peraturan ketenagakerjaan, pekerja perempuan, pekerja anak, perikanan/industri kelautan, sektor pengumpulan, pariwisata, anak jalanan. Seperti pekerja anak terburuk. Hapus kombinasi pedoman untuk perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di instansi yang bertanggung jawab.
  - e) Mengantarkan barang-barang yang diperlukan sesuai tugas pokok dan tugas kepada manajer departemen.
  - f) pelaksanaan laporan praktis dan tanggung jawab manajer layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Untuk mengevaluasi hasil, kepala bagian teknis memiliki uraian sebagai berikut:
- a) Melaksanakan program kegiatan/merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan departemen teknis untuk evaluasi personalia.
  - b) Mengembangkan dan mengawasi prosedur operasi.
  - c) Memantau dan mengevaluasi unit pemantauan/pelaksana.
  - d) Arsip/investigasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  - e) Unit Manajemen pelaksanaan penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
  - f) Melaksanakan penelitian proyek secara berkala di bidang produktivitas, kesehatan perusahaan, ergonomi serta kesehatan dan keselamatan kerja.
  - g) Gugatan terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
  - h) Penghapusan pekerjaan perempuan, pekerja anak, perikanan/maritim, manufaktur, pertanian, pariwisata, pekerjaan yang lebih buruk untuk anak jalanan dan mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan aturan perusahaan, pemantauan dan tindakan organisasi.
  - i) Melakukan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh penyedia layanan.
4. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 dengan bantuan kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu

- a) Sub Bagian Tata Usaha
- b) Seksi Penegak Hukum
- c) Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem akuntansi adalah cara untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau unit bisnis. Sistem akuntansi saat ini mahal karena perusahaan berusaha menyederhanakan biaya dan pengeluarannya.

Klaim dalam kamus bahasa Indonesia berbunyi: “Pernyataan adalah syarat penting untuk menentukan kepemilikan seseorang dan/atau pernyataan fakta atau kebenaran.” Menurut Lisalis Elias (2006), konsep mengamankan dan mengendalikan akses, keterbukaan informasi kesehatan dan manajemen penipuan adalah kemampuan pemegang kartu.

Kegiatan Kerja Praktek (Magang) di Bagian keselamatan dan kesehatan kerja (K3), ada beberapa masaiah seperti adanya kendala para pegawai khususnya di instansi keselamatan kesehatan kerja (K3) mengalami kendala dalam jaringan ponsel mereka, yang seharusnya kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara sudah menyediakan jaringan wifi di setiap instansi agar para staff atau karyawan dapat menyelesaikan atau melaksanakan tugas mereka untuk melayani tenaga kerja perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan ini dapat disimpulkan berdasarkan penataan yang tidak beraturan pada setiap pengeluaran kas yang berlaku didalam Kantor tersebut. Hal ini mengakibatkan terhambatnya aktivitas serta optimalisasi kerja para karyawan.

Jaminan Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1970 kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak diketahui serta tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa

perawatan, santunan dan tunjangan cacat sesuai Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015.

Sistem akuntansi klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tentang Jaminan Sosial terdapat pada Undang-Undang RI No.40 Tahun 2004 BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 Ayat 14 seperti yang berbunyi diatas berguna untuk memberikan dan menjamin perlindungan atas resiko-resiko yang terjadi selama bekerja dan iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat resiko lingkungan kerja yang besarnya di evaluasi selama 2 tahun sekali.

Harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama 3(tiga) tahun dihitung sejak kecelakaan kerja terjadi. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan maupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada lembaga dinas ketenagakerjaan yang berkaitan selambatnya 2x24 jam setelah kejadian kecelakaan dan perusahaan segera menindaklanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan serta melampirkan beberapa dokumen pendukung.

## **KESIMPULAN**

Sistem akuntansi klaim asuransi kecelakaan kerja yang berkaitan dengan jaminan sosial termasuk dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 14 Di bidang jaminan sosial di tempat kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. dari keberangkatan. di rumah setelah bekerja, di tempat kerja dan di rumah melalui rute yang biasa atau wajar. Jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa pengobatan, santunan dan santunan cacat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

Asuransi Kecelakaan Kerja yang diterapkan pada Kantor Wilayah Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Medan I dikelola dengan baik untuk melayani setiap pegawai perusahaan, hanya tinggal melihat apakah setiap pegawai negeri yang bekerja di kantor mendapat perlakuan yang sama/tidak ada email atau Sistem Akuntansi Pembayaran Tunai untuk Upt Dinas Pengawasan Tenaga Kerja Wilayah I Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan standar akuntansi biaya. Biro Pengawasan Tenaga

Kerja Daerah belum memiliki standar operasional pembayaran tunai untuk setiap kecelakaan di tempat kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Meiliana, R., & Febriyanti, M. A. (2019, September). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol. 10, No. 2, 71-98.
- Soleh, A. (2017). Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 2.
- Toisuta, E., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pelepasan Dan Penghentian Aset Tetap Pada Pt. X. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 14, No. 1, 27-35.
- Chicilia C Tasikrede, Jullie J Sondakh, I Gede Suwetja (2018). Analisis Sistem Akuntansi Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Pt. Dana Tabungan (Persero) Kantor Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 13, No. 03.
- Ventia Irdanasari, Rizka. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Ditinjau Dari Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk) Dan Jaminan Kematian Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Madiun. *Thesis* (Tugas Akhir D3).
- Krisnawati, Nita Ayu, Puspita, Erna dan Tohari Amin. (2020, Agustus). Analisis Sistem Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri. *Article Repository*.